

DIGITAL COMPANION

DARI UANG MENJADI NILAI

Data • Metodologi • Formula • Worksheet • Checklist • Dashboard • Kalkulator

V3 FINAL CONTENT MASTER - 7 Oktober 2026

Prinsip

Digital Companion memperluas buku. Ia bukan pengganti buku. Untuk ilustrasi yang identitas dan angkanya dimodifikasi, Digital Companion tidak mengembalikan angka asli atau membuka identitas lembaga yang sengaja disamarkan.

00. START HERE - Cara Menggunakan Digital Companion

Digital Companion disusun dalam tiga lapisan yang sama dengan buku:

Lapisan	Tujuan	Isi
READ	Memahami pesan dan cara berpikir	Buku utama.
EXPLORE	Menelusuri data, sumber, metodologi, dan rekonsiliasi	Tabel teknis, formula, catatan metodologi, dan source map.
USE	Menerapkan kerangka pada kasus nyata	Workbook, checklist, dashboard, dan kalkulator.

Aturan Data dan Anonimisasi

Label	Makna	Aturan penggunaan
PUBLIC OFFICIAL	Data resmi/publik yang disebut di buku	Boleh ditampilkan apa adanya dengan nama sumber dan periode.
ILLUSTRATIVE	Angka/nama telah dimodifikasi	Tidak boleh di-reverse engineer, dipasangkan dengan institusi tertentu, atau diganti kembali dengan angka asli.
USER INPUT	Data yang dimasukkan pembaca	Digunakan hanya untuk latihan/analisis pengguna.
DERIVED	Hasil formula/kalkulasi	Harus dapat direkonsiliasi ke input dan asumsi yang jelas.

Pagar metodologis

Kerangka RCR, TBHI, RRR, SRV, PWAR, Public Value Loss, dan berbagai dashboard dalam companion adalah alat analitis sebagaimana diposisikan di buku. Ia bukan standar akuntansi, bukan formula yuridis, dan bukan indikator resmi kecuali secara eksplisit disebut sebagai data resmi.

Peta Portal

Folder	Isi utama	Workbook
00_START_HERE	Panduan, label data, source register, update protocol	00_GUIDE
01_BAB_I	APBN/APBD, laporan keuangan, rekonsiliasi	01_APBN_APBD
02_BAB_II	Public Value Dashboard	02_PUBLIC_VALUE
03_BAB_III	Revenue Quality, RCR, TBHI, PAD cultivation	03_REVENUE_QUALITY
04_BAB_IV	SDA, deplesi, economic rent, RRR	04_RRR_SDA
05_BAB_V	Extended Sovereign Balance Sheet	05_SOV_BALANCE
06_BAB_VI	Investasi, utang, stage-gate, stress test	06_INVEST_DEBT
07_BAB_VII	Public capital, PMN, leverage, recycling	07_PUBLIC_CAPITAL

08_BAB_VIII	Conversion gap, CCC, kolektabilitas	08_CONVERSION
09_BAB_IX	FRA, SRV, PWAR, governance roles	09_FRA_SRV_PWAR
10_BAB_X	Public Value Loss, fair play, system redesign	10_ANTI_CORRUPTION
11_SOURCES	Source register dan update log	11_SOURCE_REGISTER

01. BAB I - MEMBACA UANG NEGARA

Rujukan buku: hlm. 1-16 | Workbook: 01_APBN_APBD

Fokus companion: menyatukan anggaran, realisasi, operasi akrual, kas, neraca, dan catatan menjadi satu cerita.

Persamaan dasar

Surplus/Defisit Anggaran = Pendapatan Negara - Belanja Negara

Rekonsiliasi anggaran

SiLPA/SiKPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto (disederhanakan)

Persamaan neraca

Aset = Kewajiban + Ekuitas

Operasi akrual

Surplus/Defisit-LO = Pendapatan-LO - Beban (disederhanakan)

Data publik contoh - APBN 2025

Uraian	Anggaran (Rp T)	Realisasi audited (Rp T)	Catatan
Pendapatan negara	3.005,1	2.765,13	92,0%
Belanja negara	3.621,3	3.435,46	94,9%
Defisit anggaran	616,2	670,34	108,8% dari rencana
Pembiayaan neto	616,2	742,73	-
SiLPA	-	72,40	-

Sumber sebagaimana disebut dalam buku: *Nota Keuangan APBN 2025, Kementerian Keuangan, LKPP 2025 audited/penyampaian RUU P2 APBN 2025.*

Data publik contoh - APBD DKI Jakarta 2025

Indikator	Nilai
Target pendapatan	Rp84,45 triliun
Realisasi pendapatan	Rp80,03 triliun
Anggaran belanja	Rp85,98 triliun
Realisasi belanja	Rp76,10 triliun
SiLPA	Rp5,82 triliun
Aset per 31 Desember 2025	Rp758,57 triliun
Kewajiban	Rp17,97 triliun
Ekuitas	Rp740,60 triliun
Opini BPK	WTP

Worksheet - Empat Lensa

Lensa	Pertanyaan	Bukti minimal
Anggaran	Apa yang direncanakan, diotorisasi, dan direalisasikan?	APBN/APBD, LRA, perubahan anggaran
Operasi	Hak/kewajiban ekonomi apa yang timbul?	LO, LPE, CaLK
Kas	Dari mana kas datang dan ke mana pergi?	LAK, kas/SAL, arus operasi-investasi-pembiayaan
Posisi & risiko	Apa yang dimiliki, menjadi kewajiban, dan berisiko?	Neraca, CaLK, komitmen/kontinjensi

02. BAB II - PUBLIC VALUE

Rujukan buku: hlm. 17-28 | Workbook: 02_PUBLIC_VALUE

Fokus companion: mengubah evaluasi dari 'uang dibelanjakan' menjadi 'nilai publik tercipta'.

Rantai nilai

PROBLEM → POLICY CHOICE → INSTITUTION → CAPACITY → DELIVERY → OUTPUT → OUTCOME → PUBLIC VALUE

Dashboard utama

Input → Delivery Cost → Output → Outcome → Distribution → Net Additionality → Public Value

Public Value Dashboard

Dimensi	Pertanyaan diagnostik	Evidence
Input	Berapa uang/sumber daya yang digunakan?	Anggaran, SDM, aset, waktu
Delivery Cost	Berapa biaya untuk mengubah input menjadi layanan/output?	Unit cost, procurement cost, transaction cost
Output	Apa yang benar-benar dihasilkan?	Volume, coverage, completion
Outcome	Apa yang berubah pada penerima/manusia?	Outcome indicator, baseline vs current
Distribution	Siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya?	Kelompok, wilayah, income segment
Net Additionality	Apa yang benar-benar bertambah dibanding counterfactual?	Baseline, comparison, crowding-in/out
Public Value	Apakah hasil efektif, efisien, adil, berkelanjutan, strategis, dan resilien?	Dashboard multidimensi

Guardrail

Jangan buru-buru mereduksi Public Value menjadi satu skor. Profil multidimensi lebih berguna untuk diagnosis.

03. BAB III - MEMUNGUT TANPA MEMATIKAN

Rujukan buku: hlm. 29-90 | Workbook: 03_REVENUE_QUALITY

Rantai cultivation

MICRO → FORMAL → PRODUCTIVE → SCALE UP → PROFITABLE → TAXABLE → LARGE TAXPAYER

PAD Growth - kerangka analitis

$\Delta PAD = \Delta \text{Economic Base} + \Delta \text{Compliance/Capture} + \Delta \text{Tax Burden}$

Bukan identitas statistik resmi; digunakan untuk memaksa pemisahan sumber pertumbuhan.

Revenue Cultivation Ratio (RCR)

$RCR \approx (\text{Base Growth} + \text{Formalization} + \text{Compliance/Data Improvement}) \div \text{Total Revenue Growth}$

Pilot/diagnostic indicator; denominator dan pemisahan rate effect harus diuji.

Contoh buku: Base Growth Rp200 miliar + Formalization Rp100 miliar + Compliance/Data Improvement Rp100 miliar atas total pertumbuhan penerimaan Rp500 miliar → RCR sekitar 80%.

Tax Base Health Index (TBHI) - Dashboard, bukan skor tunggal

Dimensi	Contoh indikator
Business formation	Jumlah usaha baru, entry rate
Survival	Usaha bertahan 1/3/5 tahun
Scale-up / graduation	Usaha naik kelas, omzet/produktivitas meningkat
Retention	Usaha tetap beroperasi/berinvestasi di wilayah
Formalization	Transaksi/usaha formal, registrasi, data terintegrasi
Employment	Pekerjaan formal, upah, produktivitas tenaga kerja
Investment	PMTB/investasi lokal, ekspansi kapasitas
Concentration	Ketergantungan basis pada sedikit wajib pajak/sector
Compliance cost	Waktu/biaya untuk patuh; high compliance + low compliance cost

Revenue Quality Dashboard

Payung utama: Revenue | Base | Compliance | Cost | Distribution | Competitiveness | Cultivation | Public Value.

Prinsip

RCR dan TBHI ditempatkan sebagai sub-indikator dalam Revenue Quality Dashboard, bukan sebagai perlombaan peringkat.

04. BAB IV - SETELAH TANAHNYA DIGALI, APA YANG TERSISA?

Rujukan buku: hlm. 91-110 | Workbook: 04_RRR_SDA

Rantai SDA

NATURAL WEALTH → EXTRACTION → RESOURCE VALUE → ECONOMIC RENT → STATE SHARE → ECOLOGICAL RESTORATION → REPLACEMENT WEALTH → INTERGENERATIONAL WEALTH

Data publik BPS - batu bara 2024

Indikator	Nilai	Status
Ekstraksi batu bara Class A	±836 juta ton	Data BPS/Sisnerling
Stok akhir	±31,956 miliar ton	Data BPS/Sisnerling
Nilai moneter stok akhir	±Rp9.807,566 triliun	Data BPS/Sisnerling
Deplesi	±Rp306,797 triliun	Data BPS/Sisnerling
Deplesi per ton	±Rp366.982/ton	Turunan aritmetis
Total deplesi aset lingkungan yang dicakup	±Rp707,02 triliun	Data BPS/Sisnerling
Porsi batu bara terhadap total deplesi	±43,4%	Turunan aritmetis

Sumber sebagaimana disebut di buku: BPS, Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2020-2024, Gambar 5.2 dan Lampiran 45-46. Angka 2024 berstatus sangat sementara.

Simulasi pedagogis - bukan angka resmi/tarif

Asumsi/benchmark	Nilai
Depletion benchmark	Rp366.982/ton
Economic rent (asumsi simulasi)	Rp550.000/ton
Normal return/risk premium (asumsi)	Rp150.000/ton
Replacement-wealth benchmark	Disetarakan dengan deplesi untuk simulasi
Konsekuensi aritmetis benchmark/rent	±66,7%

Resource Replacement Ratio (RRR)

RRR = Verified Replacement-Wealth Formation Attributable to Resource Revenues ÷ Adjusted Depletion Benchmark

RRR adalah kerangka diagnostik. Hindari double counting dan pastikan replacement wealth dapat diverifikasi.

RRR	Cara baca
< 1,0	Pembentukan kekayaan pengganti di bawah benchmark deplesi.
= 1,0	Setara dengan benchmark deplesi yang digunakan.
> 1,0	Pembentukan kekayaan pengganti melebihi benchmark; kualitas aset tetap harus diuji.

05. BAB V - NERACA YANG BELUM LENGKAP

Rujukan buku: hlm. 111-122 | Workbook: 05_SOV_BALANCE

Natural Resource Roll-Forward

Opening Stock + Discoveries/Reappraisal – Depletion ± Revaluation ± Other Changes = Closing Natural Resource Asset

Net Defined Benefit Position

Present Value of Defined Benefit Obligation – Fair Value of Qualifying Plan Assets

Benchmark analitis; istilah/penyajian final mengikuti standar domestik yang berlaku.

Adjusted Sovereign Net Worth

Extended Assets – Extended Liabilities

Hanya dihitung bila perimeter, basis valuasi, eliminasi intrasektor, dan treatment uncertainty cukup konsisten.

Analytical Bridge

Opening Sovereign Net Worth + Fiscal Operating Result + Discoveries/Reappraisal – Depletion ± Revaluation ± Pension/Actuarial Movements ± Guarantees/Provisions + Net Asset

Formation/Investment Return = Closing Sovereign Net Worth

Analytical bridge, bukan identity akuntansi SAP; eliminasi double counting wajib.

Recognition Gate

Pertanyaan	Ya/Tidak	Catatan
Apakah terdapat resource/right yang berada dalam reporting perimeter?		
Apakah pemerintah mengendalikan manfaat ekonomi/service potential?		
Apakah hak/kewajiban dapat diukur secara cukup andal?		
Apakah basis valuasi konsisten dengan tujuan pengukuran?		
Apakah ketidakpastian lebih tepat diakui, diungkap, atau hanya dipetakan sebagai risk exposure?		

Ladder

RECOGNIZED → QUANTIFIED BUT UNRECOGNIZED → QUALITATIVE / RISK. Tidak semua hal penting harus dipaksa masuk face of balance sheet.

06. BAB VI - INVESTASI DAN UTANG

Rujukan buku: hlm. 123-138 | Workbook: 06_INVEST_DEBT

Whole-life debt cost

Biaya penerbitan/penarikan + bunga/kupon + biaya lindung nilai + dampak kurs/suku bunga + biaya refinancing + commitment/carrying cost + opportunity cost ruang fiskal

Kerangka analitis, bukan formula akuntansi.

Debt Quality Test

Pertanyaan	Evidence
Apa yang dibiayai?	Aset/kapasitas/outcome yang jelas
Berapa lama manfaatnya bertahan?	Economic/service life
Dari mana pembayaran pokok dan bunga berasal?	CFADS/DSCR atau fiscal affordability
Seberapa sensitif terhadap kurs, bunga, pertumbuhan, atau pendapatan?	Stress test
Risiko apa yang dialihkan ke masa depan?	Maturity/refinancing/contingent exposure
Ketika utang lunas, apa yang masih tersisa?	Durable capacity / public value

Stage-Gate dan Maximum Plausible Fiscal Exposure

Stress test harus menguji kombinasi tekanan yang realistis: pendapatan lebih rendah, biaya konstruksi naik, operasi terlambat, kurs melemah, bunga naik, atau refinancing lebih mahal.

Keputusan setelah stress test

REDESIGN → RESTRUCTURE → STOP → ACTIVATE GUARANTEE, sesuai trigger yang ditetapkan.

Value Gates

Input → Commitment → Asset/Capacity → Utilization → Outcome → Durable Value

Prinsip pengunci

No New Material Debt Without a Net-Worth and Public-Value Test.

07. BAB VII - UANG NEGARA HARUS BEKERJA

Rujukan buku: hlm. 139-151 | Workbook: 07_PUBLIC_CAPITAL

Rantai public capital

APBN/APBD → Instrumen → Neraca/Kapasitas Penerima → Leverage → Output → Outcome → Return/Recycling → Public Value

Lima ukuran utama

Ukuran	Pertanyaan
Capital Preservation	Berapa modal negara yang masih terpelihara?
Public Capital Multiplier	Berapa kapasitas baru diciptakan setiap Rp1 modal publik?
Crowding-in	Apakah modal publik memobilisasi modal/sumber daya lain secara additional?
Value Conversion	Apakah modal berubah menjadi output, outcome, dan nilai?
Recycling	Berapa nilai yang kembali ke pool dan dapat digunakan lagi?

Ilustrasi Lembaga Pembiayaan A - data tetap ilustratif

Indikator ilustratif	Nilai
Kontribusi modal pemerintah kumulatif	Rp38,48 triliun
Total ekuitas	Rp12,78 triliun
Tambahan modal	Rp4,50 triliun
Aktivitas penugasan - periode awal	Rp6,57 triliun
Aktivitas penugasan - periode berikut	Rp12,15 triliun
Total pembiayaan	Rp51,48 triliun

Anonimisasi

Angka dan identitas ini adalah ilustrasi sebagaimana buku final. Digital Companion tidak memuat angka asli atau petunjuk yang dapat mengembalikan ilustrasi ke satu institusi tertentu.

Portfolio books

Pisahkan: legacy book | new commercial book | special-assignment book | recovery book.

08. BAB VIII - KETIKA PENJUALAN DAN PINJAMAN MENJADI MAHKOTA

Rujukan buku: hlm. 152-176 | Workbook: 08_CONVERSION

Rantai conversion

Transaction → Conversion → Realization → Value

Cash Conversion Cycle

CCC = DIO + DSO – DPO

Dana bergulir

Cash → Financing → Repayment → Re-lending

Ilustrasi dana bergulir - data yang dianonimkan

Kualitas	Nilai ilustratif
Lancar	Rp424,95 miliar
Kurang Lancar	Rp27,12 miliar
Diragukan	Rp3,07 miliar
Macet	Rp666,25 miliar
Jumlah	Rp1.121,39 miliar
Porsi portofolio tidak lancar	62,10%

Rekonsiliasi: Kurang Lancar + Diragukan + Macet = Rp696,44 miliar; Rp696,44 miliar ÷ Rp1.121,39 miliar ≈ 62,10%.

Ilustrasi Lembaga Pembiayaan A - arah tren dipertahankan

Indikator ilustratif	Periode awal	Periode berikut	Arah
Collection and recovery	-	Rp4,23 triliun	material
NPF net	4,07%	2,17%	membaik
NPF gross	26,16%	27,82%	memburuk/tetap sangat material

Kesimpulan analitis

Perbaikan indikator neto tidak boleh dibaca sebagai penyelesaian masalah apabila kualitas aset bruto tetap material. Legacy book dan new book harus dipisahkan.

Endpoint discipline

START POINT → INTERMEDIATE STATES → VALUE ENDPOINT → EXPECTED TIME → TOLERANCE → EVIDENCE

Early Warning

Contoh: DSO, overdue rate, aging, roll-forward ke bucket lebih buruk, cure, recovery, write-off, receivable concentration, DSCR/CFADS, dan fiscal affordability sesuai karakter instrumen.

09. BAB IX - DUA PINTU BESAR RISIKO PERPINDAHAN NILAI

Rujukan buku: hlm. 177-198 | Workbook: 09_FRA_SRV_PWAR

FRA dasar

Risk Score = Dampak (1-5) × Kemungkinan (1-5)

Starting point. Kalibrasi juga harus membaca materiality, complexity, control effectiveness, dan velocity/urgency.

Sovereign Reservation Value (SRV)

Komponen	Pertanyaan	Guardrail
Resource rent/fiscal value	Berapa rente dan public take yang masuk akal?	Gunakan scenario, cost curve, normal return; hindari gross revenue.
Investment/additionality	Investasi apa yang benar-benar tambahan karena hak diberikan?	Jangan hitung investasi yang memang wajib/akan terjadi.
Environmental obligation	Berapa biaya pemulihan dan siapa menanggung?	Pisahkan kewajiban operator dari benefit negara.
Strategic/social value	Manfaat publik apa yang dapat diverifikasi?	Gunakan KPI; jangan monetisasi paksa.
Option value	Apa nilai menunggu, menolak, atau mengubah desain award?	Uji alternatif dan timing.
Risk retained by state	Risiko apa tetap di pemerintah/masyarakat?	Kurangi/ungkap; jangan dihitung dua kali.

Public Wealth at Risk (PWAR)

Komponen dapat mencakup underpricing at award, uncaptured resource rent, revenue leakage, amendment/extension value, environmental liability shifted to the state, dan lost option value.

Cara penyajian

Jangan paksa menjadi satu angka. Gunakan scenario band: BASE | DOWNSIDE | SEVERE, dengan eliminasi double counting.

Governance roles

Peran	Fungsi
Decision Owner	Memiliki mandat dan kewenangan mengambil keputusan.
Control Owner	Menjalankan pengendalian harian dan menjaga kepatuhan proses/kontrak.
Independent Challenge	Menguji asumsi, risiko, konflik kepentingan, dan kualitas informasi sebelum keputusan.
Assurance	Menilai apakah governance, control, dan decision process bekerja sebagaimana dirancang.

Risk Mitigation Architecture

risk event → inherent risk → existing control → control effectiveness → residual risk → mitigation action → risk owner → KPI/KRI → escalation atau risk acceptance

10. BAB X - KELUAR DARI LINGKARAN SETAN KORUPSI

Rujukan buku: hlm. 199-213 | Workbook: 10_ANTI_CORRUPTION

Attributable Public Value Loss

≈ **Direct Fiscal Loss + Attributable Quality Loss + Attributable Opportunity Cost + Lost Economic Multiplier + Environmental/Social Loss + Future Fiscal Cost**

Bukan definisi hukum dan bukan standar akuntansi; hindari double counting. Institutional trust loss sebaiknya disajikan terpisah bila monetisasi tidak andal.

Red flag discipline

SIGNAL → VALIDATION → FINDING

Lima jejak

Jejak	Pertanyaan
Follow the Money	Ke mana uang/nilai mengalir?
Follow the Decision	Siapa mengubah pilihan, syarat, prioritas, atau arah keputusan - dan mengapa?
Follow the Ownership	Siapa beneficial owner/pengendali/manfaat akhir?
Follow the Exception	Siapa memperoleh waiver, diskresi, dispensasi, atau perlakuan berbeda?
Follow the Data	Siapa mengubah data, asumsi, klasifikasi, valuasi, atau akses informasi?

Closed-loop fair play

PREVENT → DETECT → CONTAIN → INVESTIGATE/ADJUDICATE → RECOVER → REDESIGN → PREVENT AGAIN

Safe-harbor analitis

Outcome buruk tidak otomatis berarti wrongdoing. Penilaian harus membaca kewenangan, proses, informasi yang tersedia saat keputusan, konflik kepentingan, dokumentasi, dan itikad/tujuan yang legitimate sesuai hukum.

11. SOURCE REGISTER DAN UPDATE PROTOCOL

Register ini mencatat sumber yang secara eksplisit disebut atau digunakan sebagai basis contoh dalam buku. Saat portal dipublikasikan, setiap entri dapat diberi tautan resmi tanpa mengubah substansi buku.

Bab	Sumber/keluarga sumber yang disebut dalam buku	Status di companion
I	Nota Keuangan APBN 2025; LKPP 2025 audited; BPK LHP LKPP 2025; Perda DKI 9/2024 dan pertanggungjawaban APBD 2025	PUBLIC OFFICIAL
II	Kerangka Public Value dalam buku; baseline, counterfactual, attribution, distribution	FRAMEWORK
III	UU HKPD/PP 35/2023; regulasi PPh/PPN/cukai yang disebut dalam buku; data penerimaan; RCR/TBHI sebagai pilot	PUBLIC + FRAMEWORK
IV	BPS Sisnerling 2020-2024; publikasi/kinerja ESDM yang disebut; regulasi PNB/SDA yang dirujuk	PUBLIC OFFICIAL + SIMULATION
V	BPS Sisnerling; SAP/PSAP; pembandingan IPSAS/IMF yang disebut	PUBLIC + FRAMEWORK
VI	APBN 2027 sebagai ilustrasi dalam buku; PIMA/kerangka investasi publik; data utang/pembiayaan yang disebut	PUBLIC + FRAMEWORK
VII	Regulasi/konsep PMN, pinjaman, subsidi, BUMD; contoh Lembaga Pembiayaan A	PUBLIC + ILLUSTRATIVE
VIII	Metodologi CCC/kolektabilitas; KUR dan contoh ilustratif dana bergulir/Lembaga Pembiayaan A	PUBLIC + ILLUSTRATIVE
IX	Regulasi pengadaan, BO, dan pemberian hak SDA yang disebut; FRA/SRV/PWAR	PUBLIC + FRAMEWORK
X	KUHP/UU penyesuaian pidana dan ketentuan antikorupsi yang disebut; Public Value Loss dan fair-play architecture	PUBLIC + FRAMEWORK

Update Log

Tanggal	Bab/Item	Jenis perubahan	Sumber baru	Dampak ke buku?	Reviewer

--	--	--	--	--	--

Aturan update

Data/regulasi boleh diperbarui di Digital Companion tanpa menunggu edisi cetak. Jika pembaruan mengubah tesis, formula, atau kesimpulan utama buku, perubahan tersebut tidak boleh dilakukan diam-diam; harus dicatat sebagai revision note untuk edisi berikutnya.

DIGITAL COMPANION V3 FINAL CONTENT MASTER

Selaras dengan Buku Final 7 Oktober 2026

Read → Explore → Use

REFERENSI PRIMER, REGULASI, DAN SOURCE MAP - V3 FINAL

Cut-off verifikasi: 7 Oktober 2026. Bagian ini menjadi lapisan sumber untuk Digital Companion dan mengikuti prinsip anonimisasi buku final.

Arsitektur sumber
PUBLIC OFFICIAL / REGULASI PRIMER = data atau hukum resmi; REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER = karya/standar yang dirujuk; KERANGKA PENULIS = kontribusi analitis buku; ILUSTRATIF = angka/nama telah dimodifikasi. Untuk Bab VII-VIII, Digital Companion tidak menyimpan atau mengembalikan identitas maupun angka asli dari kasus yang dianonimkan.

BAB I - Membaca Uang Negara

Kode	Topik/Klaim	Sumber primer/dokumen	Jenis	Periode	Fungsi dalam buku	Status	Tautan resmi/utama
I-01	APBN 2025 - postur dan baseline	Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2025	DATA PUBLIK RESMI	2025	Basis angka anggaran APBN 2025 dan pembanding terhadap realisasi.	Eksplisit/utama	https://djp.kemenkeu.go.id/?p=60363
I-02	Realisasi dan pertanggungjawaban APBN 2025	LKPP 2025 audited / penyampaian RUU P2 APBN 2025 - Kementerian Keuangan	DATA PUBLIK RESMI	2025/2026	Basis realisasi audited, defisit, pembiayaan, SiLPA dan posisi keuangan.	Eksplisit/utama	https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/penerimaan/id/data-publikasi/berita-terbaru/3012-pemerintah-sampaikan-ruu-pertanggungjawab-an-apbn-2025%2C-lkpp-kembali-raih-opini-wtp.html

I-03	Audit LKPP 2025	BPK RI - Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2025	DATA PUBLIK RESMI	2025/2026	Basis pembacaan opini WTP, temuan, rekomendasi dan perbedaan audit laporan keuangan vs efektivitas kebijakan.	Eksplisit/utama	https:// www.bpk.go.id/ lkpp
I-04	APBD DKI Jakarta 2025	Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025	REGULASI PRIMER	2024/2025	Basis legal APBD DKI 2025 sebagai contoh daerah.	Eksplisit/utama	https:// jdih.jakarta.go.id/ dokumen/detail/ 14203/peraturan- daerah-nomor-9- tahun-2024tentan g-anggaran- pendapatan-dan- belanja-daerah- tahun- anggaran-2025
I-05	Pertanggungjawaban APBD DKI 2025	Pemprov DKI Jakarta - penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025	DATA PUBLIK RESMI	2025/2026	Basis realisasi pendapatan, belanja, SiLPA, aset, kewajiban, ekuitas dan opini.	Eksplisit/utama	https:// www.jakarta.go.id /siaran-pers/6761- SP-HMS-06-2026
I-06	Standar Akuntansi Pemerintahan	PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	REGULASI PRIMER	2010	Basis normatif SAP/PSAP untuk LKPP/LKPD.	Eksplisit/utama	https:// peraturan.bpk.go.i d/Details/5095/ pp-no-71- tahun-2010
I-07	Kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat	PMK Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat	REGULASI PRIMER	2025	Basis kebijakan akuntansi pusat mulai penyusunan LK TA 2025.	Eksplisit/utama	https:// jdih.kemenkeu.go. id/dok/pmk-100- tahun-2025
I-08	Kerangka keuangan negara	UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	REGULASI PRIMER	2003/2004	Landasan arsitektur anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.	Pendukung primer	https:// peraturan.bpk.go.i d

BAB II - Public Value

Kode	Topik/Klaim	Sumber primer/dokumen	Jenis	Periode	Fungsi dalam buku	Status	Tautan resmi/utama
II-01	Public Value / strategic triangle	Mark H. Moore, Creating Public Value: Strategic Management in Government, Harvard University Press	REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER	1995	Rujukan eksplisit untuk substantive value, legitimacy/support dan operational capacity.	Eksplisit/utama	https://markmoore.scholars.harvard.edu/topics/public-management
II-02	Dashboard Public Value buku	Kerangka penulis: Problem → Policy Choice → Institution → Capacity → Delivery → Output → Outcome → Public Value	KERANGKA PENULIS	2026	Kerangka sintesis buku; bukan indikator resmi dan tidak diklaim berasal dari satu standar eksternal.	Author framework	—

BAB III - Memungut Tanpa Mematikan

Kode	Topik/Klaim	Sumber primer/dokumen	Jenis	Periode	Fungsi dalam buku	Status	Tautan resmi/utama
III-01	Kontribusi Wajib Pajak Besar 2024	DJP - Penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 2024 Kembali Lampaui Target	DATA PUBLIK RESMI	2024/2025	Basis angka Rp571,37 triliun dan 29,57% kontribusi nasional.	Eksplisit/utama	https://pajak.go.id/id/siaran-pers/penerimaan-kanwil-djp-wajib-pajak-besar-2024-kembali-lampaui-target
III-02	PPh Final UMKM 0,5%	PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022	REGULASI PRIMER	2026	Basis pengaturan PPh final atas WP dengan peredaran bruto tertentu.	Eksplisit/utama	https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-20-tahun-2026/summary

III-03	Tarif PPN dan desain HPP	UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	REGULASI PRIMER	2021	Landasan perubahan tarif PPN dan kerangka perpajakan yang dirujuk.	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021
III-04	DPP nilai lain PPN 2025	PMK Nomor 131 Tahun 2024	REGULASI PRIMER	2024/2025	Basis perlakuan PPN 2025 termasuk nilai lain/DPP sesuai ketentuan.	Eksplisit/utama	https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-131-tahun-2024
III-05	Struktur DBH dan konteks PPN	Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026	DATA PUBLIK RESMI	2026	Basis pernyataan struktur DBH pajak dalam desain fiskal berjalan; PPN-sharing diposisikan sebagai hipotesis, bukan DBH berjalan.	Eksplisit/utama	https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/507d21b0-2abe-4d75-86aa-dc3efe505843
III-06	Destination principle PPN	OECD International VAT/GST Guidelines	REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER	2017	Referensi konseptual destination principle dan jurisdiction of consumption; bukan dasar hukum DBH domestik.	Eksplisit/utama	https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2017/04/international-vat-gst-guidelines_g1g75db4/9789264271401-en.pdf

III-07	Hubungan keuangan pusat-daerah	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD	REGULASI PRIMER	2022	Basis pajak/retribusi daerah, TKD, belanja dan pembiayaan daerah.	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
III-08	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD	REGULASI PRIMER	2023	Basis pemungutan, opsen, dukungan iklim usaha/investasi dan tata kelola PDRD.	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023
III-09	RCR, TBHI, Revenue Quality Dashboard	Kerangka penulis	KERANGKA PENULIS	2026	Pilot/diagnostic framework; bukan indikator resmi. Metodologi wajib diuji sebelum penggunaan statistik.	Author framework	—

BAB IV - Setelah Tanahnya Digali, Apa yang Tersisa?

Kode	Topik/Klaim	Sumber primer/dokumen	Jenis	Periode	Fungsi dalam buku	Status	Tautan resmi/utama
IV-01	Stok, ekstraksi dan deplesi SDA	BPS - Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2020-2024	DATA PUBLIK RESMI	2024 data / rilis 2025	Basis data stok, ekstraksi, neraca moneter, deplesi; buku merujuk Gambar 5.2 dan Lampiran 45-46.	Eksplisit/utama	https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/30/48e29af53d4127452b148791/sistem-terintegrasi-neraca-lingkungan-dan-ekonomi-indonesia-2020-2024.html

IV-02	Hartwick Rule	John M. Hartwick, 'Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources', AER 67(5):972-974	REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER	1977	Landasan konseptual investasi rente sumber daya untuk keadilan antargenerasi.	Eksplisit/utama	https://ideas.repec.org/a/aea/aecrev/v67y1977i5p972-74.html
IV-03	PNBP minerba dan produksi	Kementerian ESDM - Laporan Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2025	DATA PUBLIK RESMI	2025	Basis konteks PNBP minerba dan produksi komoditas yang disebut dalam buku.	Eksplisit/utama	https://esdm.go.id/id/publikasi/laporan-kinerja
IV-04	Kerangka pengelolaan PNB	UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNB	REGULASI PRIMER	2018	Landasan prinsip pengelolaan PNB.	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/90041/uu-no-9-tahun-2018
IV-05	Penetapan tarif dan pengelolaan PNB	PP Nomor 44 Tahun 2025	REGULASI PRIMER	2025	Basis tata cara penetapan tarif, pengelolaan, keberatan, keringanan dan pengembalian PNB.	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/331115/pp-no-44-tahun-2025
IV-06	Tarif PNB Kementerian ESDM	PP Nomor 19 Tahun 2025	REGULASI PRIMER	2025	Basis jenis dan tarif PNB yang berlaku pada Kementerian ESDM.	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/320049/pp-no-19-tahun-2025
IV-07	Perpajakan/PNB usaha batubara	PP Nomor 18 Tahun 2025	REGULASI PRIMER	2025	Perubahan atas PP 15/2022 mengenai perlakuan perpajakan dan/atau PNB usaha pertambangan batubara.	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/320043

IV-08	Dana Perkebunan	Perpres Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan	REGULASI PRIMER	2024	Basis struktur pengumpulan/penggunaan dana perkebunan dan kelembagaan.	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/305311/perpres-no-132-tahun-2024
IV-09	Tarif layanan Dana Perkebunan	PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo. PMK Nomor 9 Tahun 2026	REGULASI PRIMER	2025/2026	Basis tarif layanan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan dan perubahannya.	Eksplisit/utama	https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-69-tahun-2025/view
IV-10	Moratorium/evaluasi sawit	Inpres Nomor 8 Tahun 2018	REGULASI PRIMER	2018	Preseden penundaan/evaluasi perizinan sawit dan peningkatan produktivitas.	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/92813/inpres-no-8-tahun-2018
IV-11	Simulasi deplesi-economic rent-RRR	Asumsi dan perhitungan penulis	ILUSTRASI/DERIVED	2026	Economic rent, normal return/risk premium dan pembagian simulatif bukan angka BPS, bukan tarif, bukan kewajiban fiskal.	Author simulation	—

BAB V - Neraca yang Belum Lengkap

Kode	Topik/Klaim	Sumber primer/dokumen	Jenis	Periode	Fungsi dalam buku	Status	Tautan resmi/utama
------	-------------	-----------------------	-------	---------	-------------------	--------	--------------------

V-01	Natural wealth/depletion	BPS - Sisnerling 2020-2024	DATA PUBLIK RESMI	2024 data / rilis 2025	Basis pembacaan aset sumber daya secara statistik dan perubahan stok/nilai.	Eksplisit/utama	https:// www.bps.go.id/ id/publication/ 2025/12/30/48e29 af53d4127452b14 8791/sistem- terintegrasi- neraca- lingkungan-dan- ekonomi- indonesia-2020- 2024.html
V-02	Kebijakan akuntansi pusat/pensiun disclosure	PMK Nomor 100 Tahun 2025	REGULASI PRIMER	2025	Basis kebijakan akuntansi pusat dan penyajian/pengungkapan terkait.	Eksplisit/utama	https:// jdih.kemenkeu.go. id/dok/pmk-100- tahun-2025
V-03	Natural resources held for conservation	IPSAS 51, Tangible Natural Resources Held for Conservation	STANDAR INTERNASIONAL	2026	Pembanding internasional untuk natural resources; tidak otomatis menjadi SAP Indonesia.	Eksplisit/pembanding	https:// www.ipsasb.org/ publications/ ipsas-51-tangible- natural-resources- held-conservation
V-04	Employee benefits / defined benefit	IPSAS 39, Employee Benefits	STANDAR INTERNASIONAL	2016/current	Pembanding konseptual kewajiban imbalan kerja/pensiun; bukan standar domestik.	Eksplisit/pembanding	https:// www.ipsasb.org/ publications/ ipsas-39- employee- benefits-2

V-05	Public sector balance sheet/public wealth	IMF Fiscal Monitor October 2018 - Managing Public Wealth	REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER	2018	Pembanding public sector balance sheet, aset, natural resources dan pension liabilities.	Eksplisit/utama	https://www.imf.org/en/publications/fm/issues/2018/10/04/fiscal-monitor-october-2018
V-06	Extended sovereign balance sheet & analytical bridge	Kerangka penulis	KERANGKA PENULIS	2026	Analytical bridge; bukan identity akuntansi SAP. Eliminasi double counting wajib.	Author framework	—

BAB VI - Investasi dan Utang

Kode	Topik/Klaim	Sumber primer/dokumen	Jenis	Periode	Fungsi dalam buku	Status	Tautan resmi/utama
VI-01	Postur APBN 2027	Kementerian Keuangan - RUU APBN 2027 Resmi Disahkan, 29 September 2026	DATA PUBLIK RESMI	2027 APBN / rilis 2026	Basis pendapatan Rp3.435,1T, belanja Rp4.106,3T, pembiayaan Rp671,2T, defisit 2,4% PDB dalam buku.	Eksplisit/utama	https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Suahasil-Rapur-RUU-APBN-2027

VI-02	Public Investment Management Assessment	IMF - PIMA Handbook: Public Investment Management Assessment, 1st Edition	REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER	2022	Landasan pembanding tata kelola investasi publik dan siklus proyek.	Eksplisit/utama	https://www.imf.org/en/publications/books/issues/2022/07/12/pima-handbook-public-investment-management-assessment-1st-edition-50166
VI-03	PIMA diagnostic framework	IMF Infrastructure Governance - PIMA	REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER	Current	Referensi operasional penilaian kelembagaan investasi publik.	Pendukung primer	https://infrastructuregovern.imf.org/content/PIMA/Home/PimaTool/What-is-PIMA.html
VI-04	Stage-gate, maximum plausible fiscal exposure, value gates	Kerangka penulis	KERANGKA PENULIS	2026	Alat analitis buku; bukan formula regulasi/akuntansi.	Author framework	—

BAB VII - Uang Negara Harus Bekerja

Kode	Topik/Klaim	Sumber primer/dokumen	Jenis	Periode	Fungsi dalam buku	Status	Tautan resmi/utama
VII-01	Definisi dan tata cara PMN	PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2016	REGULASI PRIMER	2005	Basis definisi PMN sebagai pemisahan kekayaan negara dan dikelola secara korporasi.	Pendukung primer	https://peraturan.bpk.go.id/Details/49641/pp-no-44-tahun-2005

VII-02	Modal BUMD/PMD	PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	REGULASI PRIMER	2017	Basis penambahan modal BUMD, pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan/penugasan dan kebutuhan kajian.	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/64765/pp-no-54-tahun-2017
VII-03	Lembaga Pembiayaan A	Data ilustratif versi buku final	ILUSTRATIF	2026	Identitas dan angka dimodifikasi; tidak ada sumber institusional asli di portal.	ANONYMIZED	—
VII-04	Capital preservation/leverage/recycling/crowding-in	Kerangka penulis	KERANGKA PENULIS	2026	Framework evaluasi public capital setelah penempatan.	Author framework	—

BAB VIII - Ketika Penjualan dan Pinjaman Menjadi Mahkota

Kode	Topik/Klaim	Sumber primer/dokumen	Jenis	Periode	Fungsi dalam buku	Status	Tautan resmi/utama
VIII-01	Kebijakan KUR 2026 - akses, debitur baru/graduasi	Kemenko Perekonomian - Konsolidasi Kredit Program Pemerintah 2026 / publikasi KUR 2026	DATA PUBLIK RESMI	2026	Referensi publik untuk pentingnya debitur baru, graduasi/naik kelas dan kualitas penyaluran.	Eksplisit/pendukung	https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6784/konsolidasi-kredit-program-pemerintah-2026-perkuat-pedoman-pelaksanaan-kredit-program-optimalkan-penyaluran-dan-wujudkan-pertumbuhan-ekonomi-inklusif-berbasis-usaha-mikro-dan-kecil

VIII-02	Dana bergulir ilustratif	Data ilustratif versi buku final: Lancar 424,95; KL 27,12; Diragukan 3,07; Macet 666,25; total 1.121,39; tidak lancar 62,10%	ILUSTRATIF	2026	Hanya angka ilustratif final; sumber/identitas asli tidak disimpan dan tidak dipulihkan di Digital Companion.	ANONYMIZED	—
VIII-03	Lembaga Pembiayaan A - kualitas aset	Data ilustratif versi buku final: recovery 4,23T; NPF net 4,07% → 2,17%; NPF gross 26,16% → 27,82%	ILUSTRATIF	2026	Arah tren dipertahankan; identitas dan angka asal tidak tersedia di portal.	ANONYMIZED	—
VIII-04	Conversion gap, CCC, endpoint discipline	Kerangka penulis	KERANGKA PENULIS	2026	Alat diagnosis transaksi → conversion → realization → value.	Author framework	—

BAB IX - Dua Pintu Besar Risiko Perpindahan Nilai

Kode	Topik/Klaim	Sumber primer/dokumen	Jenis	Periode	Fungsi dalam buku	Status	Tautan resmi/utama
IX-01	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Perpres Nomor 46 Tahun 2025 jo. Perpres 16/2018	REGULASI PRIMER	2025	Kerangka PBJ; proses sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima.	Eksplisit/utama	https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-46-tahun-2025
IX-02	Katalog Elektronik	Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026	REGULASI PRIMER	2026	Katalog Elektronik/e-purchasing; mencabut Peraturan LKPP 9/2021.	Eksplisit/utama	https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-2-tahun-2026

IX-03	Risiko e-procurement	KPK - Laporan Kajian Tata Kelola e-Procurement Dalam Pengadaan Barang & Jasa Tahun 2025	DATA/Kajian PRIMER	2025	Basis pembacaan risiko governance e-procurement dan perlunya challenge/assurance.	Eksplisit/utama	https://cms.kpk.go.id/storage/9967/LAPORAN-KAJIAN-TATA-KELOLA-E-PROCUREMENT-DALAM-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA-TAHUN-2025.pdf
IX-04	Konteks penindakan/pencegahan KPK	KPK - Laporan Tahunan 2025	DATA PUBLIK RESMI	2025	Konteks risiko dan pencegahan korupsi yang dirujuk.	Eksplisit/pendukung	https://cms.kpk.go.id/storage/9535/Laporan-Tahunan-KPK-2025-Website.pdf
IX-05	Corruption Risk Assessment	KPK - Panduan Asesmen Risiko Korupsi Regulasi (CRA)	PEDOMAN PRIMER	2025	Pembandingan risk-based prevention pada regulasi.	Pendukung	https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/panduan-asesmen
IX-06	Pemberian hak minerba	PP Nomor 39 Tahun 2025	REGULASI PRIMER	2025	Perubahan kedua PP 96/2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha minerba dan mekanisme prioritas tertentu.	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/331105/pp-no-39-tahun-2025

IX-07	Beneficial ownership	Perpres Nomor 13 Tahun 2018	REGULASI PRIMER	2018	Basis prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi.	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/73583/perpres-no-13-tahun-2018
IX-08	FRA, SRV, PWAR, governance roles	Kerangka penulis	KERANGKA PENULIS	2026	Alat analitis untuk prioritization, reservation value, public wealth at risk dan governance challenge; bukan definisi hukum kerugian negara.	Author framework	—

BAB X - Keluar dari Lingkaran Setan Korupsi

Kode	Topik/Klaim	Sumber primer/dokumen	Jenis	Periode	Fungsi dalam buku	Status	Tautan resmi/utama
X-01	KUHP Nasional	UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	REGULASI PRIMER	2023/berlaku 2026	KUHP berlaku 2 Januari 2026; rujukan tindak pidana dibaca bersama penyesuaian 2026.	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023
X-02	Penyesuaian pidana	UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana	REGULASI PRIMER	2026	Penyesuaian ketentuan pidana sehubungan berlakunya KUHP Nasional.	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026
X-03	Pemberantasan Tipikor	UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001	REGULASI PRIMER	1999/2001	Kerangka Tipikor yang tetap relevan bersama perubahan/penyesuaian KUHP.	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999

X-04	Pelindungan saksi dan korban	UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban	REGULASI PRIMER	2026	Basis rezim pelindungan saksi/korban yang disebut berlaku sejak 20 Mei 2026.	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/349942/uu-no-3-tahun-2026
X-05	Public Value Loss / five traces / fair-play loop	Kerangka penulis	KERANGKA PENULIS	2026	Bukan definisi hukum kerugian negara dan bukan formula pidana/akuntansi; digunakan untuk diagnosis sistem dan redesign.	Author framework	—

Catatan Metodologis Khusus - Sisnerling dan Simulasi Bab IV

Pemisahan data resmi dan simulasi

Data ekstraksi, stok, dan deplesi bersumber dari BPS, Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2020-2024. Angka economic rent, normal return/risk premium, replacement-wealth benchmark, serta seluruh hasil simulasi turunannya merupakan ilustrasi analitis penulis. Angka tersebut bukan estimasi resmi BPS, bukan tarif pajak atau PNBp, bukan nilai kewajiban fiskal, dan bukan rekomendasi terhadap perusahaan atau pihak tertentu.

Komponen	Status	Aturan penggunaan
Ekstraksi, stok, nilai moneter stok, deplesi	DATA BPS	Gunakan angka publik BPS dan catat status 2024 sangat sementara.
Deplesi per ton	DERIVED	Hasil pembagian nilai deplesi dengan volume ekstraksi; tampilkan formula.
Economic rent Rp550.000/ton	ILUSTRATIF	Asumsi pedagogis, bukan estimasi resmi.
Normal return/risk premium Rp150.000/ton	ILUSTRATIF	Asumsi pedagogis, bukan benchmark industri resmi.
66,7%	DERIVED DARI SIMULASI	Konsekuensi aritmetis benchmark deplesi / economic rent ilustratif; bukan tarif/state take.
RRR	KERANGKA PENULIS	Diagnostic framework; metodologi attribution dan double counting harus dijelaskan.

MASTER REGULATORY MAP

Kode	Bab	Regulasi	Konteks dalam buku	Tahun/versi	Posisi	Tautan
------	-----	----------	--------------------	-------------	--------	--------

I-04	Bab I	Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025	APBD DKI Jakarta 2025	2024/2025	Eksplisit/utama	https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/14203/peraturan-daerah-nomor-9-tahun-2024tentang-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2025
I-06	Bab I	PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Standar Akuntansi Pemerintahan	2010	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010
I-07	Bab I	PMK Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat	Kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat	2025	Eksplisit/utama	https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-100-tahun-2025
I-08	Bab I	UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Kerangka keuangan negara	2003/2004	Pendukung primer	https://peraturan.bpk.go.id
III-02	Bab III	PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022	PPh Final UMKM 0,5%	2026	Eksplisit/utama	https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-20-tahun-2026/summary
III-03	Bab III	UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Tarif PPN dan desain HPP	2021	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021

III-04	Bab III	PMK Nomor 131 Tahun 2024	DPP nilai lain PPN 2025	2024/2025	Eksplisit/utama	https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-131-tahun-2024
III-07	Bab III	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD	Hubungan keuangan pusat-daerah	2022	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
III-08	Bab III	PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2023	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023
IV-04	Bab IV	UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP	Kerangka pengelolaan PNBP	2018	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/90041/uu-no-9-tahun-2018
IV-05	Bab IV	PP Nomor 44 Tahun 2025	Penetapan tarif dan pengelolaan PNBP	2025	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/331115/pp-no-44-tahun-2025
IV-06	Bab IV	PP Nomor 19 Tahun 2025	Tarif PNBP Kementerian ESDM	2025	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/320049/pp-no-19-tahun-2025
IV-07	Bab IV	PP Nomor 18 Tahun 2025	Perpajakan/PNBP usaha batubara	2025	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/320043

IV-08	Bab IV	Perpres Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan	Dana Perkebunan	2024	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/305311/perpres-no-132-tahun-2024
IV-09	Bab IV	PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo. PMK Nomor 9 Tahun 2026	Tarif layanan Dana Perkebunan	2025/2026	Eksplisit/utama	https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-69-tahun-2025/view
IV-10	Bab IV	Inpres Nomor 8 Tahun 2018	Moratorium/evaluasi sawit	2018	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/92813/inpres-no-8-tahun-2018
V-02	Bab V	PMK Nomor 100 Tahun 2025	Kebijakan akuntansi pusat/pensiun disclosure	2025	Eksplisit/utama	https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-100-tahun-2025
VII-01	Bab VII	PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2016	Definisi dan tata cara PMN	2005	Pendukung primer	https://peraturan.bpk.go.id/Details/49641/pp-no-44-tahun-2005
VII-02	Bab VII	PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	Modal BUMD/PMD	2017	Eksplisit/utama	https://peraturan.bpk.go.id/Details/64765/pp-no-54-tahun-2017

IX-01	Bab IX	Perpres Nomor 46 Tahun 2025 jo. Perpres 16/2018	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2025	Eksplisit/utama	https:// jdih.lkpp.go.id/ regulation/peraturan- presiden/peraturan- presiden-nomor-46- tahun-2025
IX-02	Bab IX	Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026	Katalog Elektronik	2026	Eksplisit/utama	https:// jdih.lkpp.go.id/ regulation/peraturan- lkpp/peraturan-lkpp- nomor-2-tahun-2026
IX-06	Bab IX	PP Nomor 39 Tahun 2025	Pemberian hak minerba	2025	Eksplisit/utama	https:// peraturan.bpk.go.id/ Details/331105/pp- no-39-tahun-2025
IX-07	Bab IX	Perpres Nomor 13 Tahun 2018	Beneficial ownership	2018	Eksplisit/utama	https:// peraturan.bpk.go.id/ Details/73583/ perpres-no-13- tahun-2018
X-01	Bab X	UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	KUHP Nasional	2023/berlaku 2026	Eksplisit/utama	https:// peraturan.bpk.go.id/ Details/234935/uu- no-1-tahun-2023
X-02	Bab X	UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana	Penyesuaian pidana	2026	Eksplisit/utama	https:// peraturan.bpk.go.id/ Details/337869/uu- no-1-tahun-2026

X-03	Bab X	UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001	Pemberantasan Tipikor	1999/2001	Eksplisit/utama	https:// peraturan.bpk.go.id/ Details/45350/uu- no-31-tahun-1999
X-04	Bab X	UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban	Pelindungan saksi dan korban	2026	Eksplisit/utama	https:// peraturan.bpk.go.id/ Details/349942/uu- no-3-tahun-2026

SOURCE MAP - DARI KLAIM KE BUKTI

Jenis klaim	Sumber yang diprioritaskan	Cara tampil di portal	Pembaruan
Angka fiskal/keuangan resmi	Kemenkeu, BPK, Pemda, BPS, ESDM, Kemenko	Tabel + periode + source note + URL primer	Update jika seri resmi berubah/revisi
Ketentuan hukum	JDIH BPK/JDIH Kemenkeu/JDIH LKPP/JDIH Pemda	Nomor, judul, status, tanggal berlaku, URL	Cek status perubahan/pencabutan
Konsep akademik/internasional	Karya asli/standar resmi (Moore, Hartwick, OECD, IMF, IPSASB)	Citation lengkap + batas penerapan di Indonesia	Update jika standar berubah
Framework penulis	Buku dan Digital Companion	Formula/template + methodological note	Tidak diubah diam-diam bila mengubah tesis
Ilustrasi anonimisasi	Hanya angka versi buku final	Label ILLUSTRATIVE; tidak ada link ke institusi	Tidak reverse-engineer; angka asli tidak disimpan

MASTER REFERENCES

Kode	Bab	Referensi	Jenis	Tahun/versi	Digunakan untuk	URL
I-01	Bab I	Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2025	DATA PUBLIK RESMI	2025	Basis angka anggaran APBN 2025 dan pembanding terhadap realisasi.	https:// djpk.kemenkeu.go.id /?p=60363

I-02	Bab I	LKPP 2025 audited / penyampaian RUU P2 APBN 2025 - Kementerian Keuangan	DATA PUBLIK RESMI	2025/2026	Basis realisasi audited, defisit, pembiayaan, SiLPA dan posisi keuangan.	https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/penerimaan/id/data-publikasi/berita-terbaru/3012-pemerintah-sampaikan-ruu-pertanggungjawaban-apbn-2025%2C-lkpp-kembali-raih-opini-wtp.html
I-03	Bab I	BPK RI - Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2025	DATA PUBLIK RESMI	2025/2026	Basis pembacaan opini WTP, temuan, rekomendasi dan perbedaan audit laporan keuangan vs efektivitas kebijakan.	https://www.bpk.go.id/lkpp
I-04	Bab I	Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025	REGULASI PRIMER	2024/2025	Basis legal APBD DKI 2025 sebagai contoh daerah.	https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/14203/peraturan-daerah-nomor-9-tahun-2024tentang-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2025
I-05	Bab I	Pemprov DKI Jakarta - penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025	DATA PUBLIK RESMI	2025/2026	Basis realisasi pendapatan, belanja, SiLPA, aset, kewajiban, ekuitas dan opini.	https://www.jakarta.go.id/siaran-pers/6761-SP-HMS-06-2026
I-06	Bab I	PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	REGULASI PRIMER	2010	Basis normatif SAP/PSAP untuk LKPP/LKPD.	https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010

I-07	Bab I	PMK Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat	REGULASI PRIMER	2025	Basis kebijakan akuntansi pusat mulai penyusunan LK TA 2025.	https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-100-tahun-2025
I-08	Bab I	UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	REGULASI PRIMER	2003/2004	Landasan arsitektur anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.	https://peraturan.bpk.go.id
II-01	Bab II	Mark H. Moore, Creating Public Value: Strategic Management in Government, Harvard University Press	REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER	1995	Rujukan eksplisit untuk substantive value, legitimacy/support dan operational capacity.	https://markmoore.scholars.harvard.edu/topics/public-management
II-02	Bab II	Kerangka penulis: Problem → Policy Choice → Institution → Capacity → Delivery → Output → Outcome → Public Value	KERANGKA PENULIS	2026	Kerangka sintesis buku; bukan indikator resmi dan tidak diklaim berasal dari satu standar eksternal.	—
III-01	Bab III	DJP - Penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 2024 Kembali Lampau Target	DATA PUBLIK RESMI	2024/2025	Basis angka Rp571,37 triliun dan 29,57% kontribusi nasional.	https://pajak.go.id/siaran-pers/penerimaan-kanwil-djp-wajib-pajak-besar-2024-kembali-lampau-target
III-02	Bab III	PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022	REGULASI PRIMER	2026	Basis pengaturan PPh final atas WP dengan peredaran bruto tertentu.	https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-20-tahun-2026/summary
III-03	Bab III	UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	REGULASI PRIMER	2021	Landasan perubahan tarif PPN dan kerangka perpajakan yang dirujuk.	https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021

III-04	Bab III	PMK Nomor 131 Tahun 2024	REGULASI PRIMER	2024/2025	Basis perlakuan PPN 2025 termasuk nilai lain/DPP sesuai ketentuan.	https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-131-tahun-2024
III-05	Bab III	Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026	DATA PUBLIK RESMI	2026	Basis pernyataan struktur DBH pajak dalam desain fiskal berjalan; PPN-sharing diposisikan sebagai hipotesis, bukan DBH berjalan.	https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/507d21b0-2abe-4d75-86aa-dc3efe505843
III-06	Bab III	OECD International VAT/GST Guidelines	REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER	2017	Referensi konseptual destination principle dan jurisdiction of consumption; bukan dasar hukum DBH domestik.	https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2017/04/international-vat-gst-guidelines_g1g75db4/9789264271401-en.pdf
III-07	Bab III	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD	REGULASI PRIMER	2022	Basis pajak/retribusi daerah, TKD, belanja dan pembiayaan daerah.	https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
III-08	Bab III	PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD	REGULASI PRIMER	2023	Basis pemungutan, opsen, dukungan iklim usaha/investasi dan tata kelola PDRD.	https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023
III-09	Bab III	Kerangka penulis	KERANGKA PENULIS	2026	Pilot/diagnostic framework; bukan indikator resmi. Metodologi wajib diuji sebelum penggunaan statistik.	—

IV-01	Bab IV	BPS - Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2020-2024	DATA PUBLIK RESMI	2024 data / rilis 2025	Basis data stok, ekstraksi, neraca moneter, deplesi; buku merujuk Gambar 5.2 dan Lampiran 45-46.	https:// www.bps.go.id/id/ publication/ 2025/12/30/48e29af5 3d4127452b148791/ sistem-terintegrasi- neraca-lingkungan- dan-ekonomi- indonesia-2020- 2024.html
IV-02	Bab IV	John M. Hartwick, 'Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources', AER 67(5):972-974	REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER	1977	Landasan konseptual investasi rente sumber daya untuk keadilan antargenerasi.	https:// ideas.repec.org/a/ aea/aecrev/ v67y1977i5p972- 74.html
IV-03	Bab IV	Kementerian ESDM - Laporan Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2025	DATA PUBLIK RESMI	2025	Basis konteks PNBPNP minerba dan produksi komoditas yang disebut dalam buku.	https://esdm.go.id/ id/publikasi/laporan- kinerja
IV-04	Bab IV	UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPNP	REGULASI PRIMER	2018	Landasan prinsip pengelolaan PNBPNP.	https:// peraturan.bpk.go.id/ Details/90041/uu- no-9-tahun-2018
IV-05	Bab IV	PP Nomor 44 Tahun 2025	REGULASI PRIMER	2025	Basis tata cara penetapan tarif, pengelolaan, keberatan, keringanan dan pengembalian PNBPNP.	https:// peraturan.bpk.go.id/ Details/331115/pp- no-44-tahun-2025
IV-06	Bab IV	PP Nomor 19 Tahun 2025	REGULASI PRIMER	2025	Basis jenis dan tarif PNBPNP yang berlaku pada Kementerian ESDM.	https:// peraturan.bpk.go.id/ Details/320049/pp- no-19-tahun-2025

IV-07	Bab IV	PP Nomor 18 Tahun 2025	REGULASI PRIMER	2025	Perubahan atas PP 15/2022 mengenai perlakuan perpajakan dan/atau PNPB usaha pertambangan batubara.	https://peraturan.bpk.go.id/Details/320043
IV-08	Bab IV	Perpres Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan	REGULASI PRIMER	2024	Basis struktur penghimpunan/penggunaan dana perkebunan dan kelembagaan.	https://peraturan.bpk.go.id/Details/305311/perpres-no-132-tahun-2024
IV-09	Bab IV	PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo. PMK Nomor 9 Tahun 2026	REGULASI PRIMER	2025/2026	Basis tarif layanan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan dan perubahannya.	https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-69-tahun-2025/view
IV-10	Bab IV	Inpres Nomor 8 Tahun 2018	REGULASI PRIMER	2018	Preseden penundaan/evaluasi perizinan sawit dan peningkatan produktivitas.	https://peraturan.bpk.go.id/Details/92813/inpres-no-8-tahun-2018
IV-11	Bab IV	Asumsi dan perhitungan penulis	ILUSTRASI/DERIVED	2026	Economic rent, normal return/risk premium dan pembagian simulatif bukan angka BPS, bukan tarif, bukan kewajiban fiskal.	—
V-01	Bab V	BPS - Sisnerling 2020-2024	DATA PUBLIK RESMI	2024 data / rilis 2025	Basis pembacaan aset sumber daya secara statistik dan perubahan stok/nilai.	https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/30/48e29af53d4127452b148791/sistem-terintegrasi-neraca-lingkungan-dan-ekonomi-indonesia-2020-2024.html

V-02	Bab V	PMK Nomor 100 Tahun 2025	REGULASI PRIMER	2025	Basis kebijakan akuntansi pusat dan penyajian/pengungkapan terkait.	https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-100-tahun-2025
V-03	Bab V	IPSAS 51, Tangible Natural Resources Held for Conservation	STANDAR INTERNASIONAL	2026	Pembanding internasional untuk natural resources; tidak otomatis menjadi SAP Indonesia.	https://www.ipsasb.org/publications/ipsas-51-tangible-natural-resources-held-conservation
V-04	Bab V	IPSAS 39, Employee Benefits	STANDAR INTERNASIONAL	2016/current	Pembanding konseptual kewajiban imbalan kerja/pensiun; bukan standar domestik.	https://www.ipsasb.org/publications/ipsas-39-employee-benefits-2
V-05	Bab V	IMF Fiscal Monitor October 2018 - Managing Public Wealth	REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER	2018	Pembanding public sector balance sheet, aset, natural resources dan pension liabilities.	https://www.imf.org/en/publications/fm/issues/2018/10/04/fiscal-monitor-october-2018
V-06	Bab V	Kerangka penulis	KERANGKA PENULIS	2026	Analytical bridge; bukan identity akuntansi SAP. Eliminasi double counting wajib.	—
VI-01	Bab VI	Kementerian Keuangan - RUU APBN 2027 Resmi Disahkan, 29 September 2026	DATA PUBLIK RESMI	2027 APBN / rilis 2026	Basis pendapatan Rp3.435,1T, belanja Rp4.106,3T, pembiayaan Rp671,2T, defisit 2,4% PDB dalam buku.	https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Suahasil-Rapur-RUU-APBN-2027

VI-02	Bab VI	IMF - PIMA Handbook: Public Investment Management Assessment, 1st Edition	REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER	2022	Landasan pembandingan tata kelola investasi publik dan siklus proyek.	https://www.imf.org/en/publications/books/issues/2022/07/12/pima-handbook-public-investment-management-assessment-1st-edition-50166
VI-03	Bab VI	IMF Infrastructure Governance - PIMA	REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER	Current	Referensi operasional penilaian kelembagaan investasi publik.	https://infrastructuregovern.imf.org/content/PIMA/Home/PimaTool/What-is-PIMA.html
VI-04	Bab VI	Kerangka penulis	KERANGKA PENULIS	2026	Alat analitis buku; bukan formula regulasi/akuntansi.	—
VII-01	Bab VII	PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2016	REGULASI PRIMER	2005	Basis definisi PMN sebagai pemisahan kekayaan negara dan dikelola secara korporasi.	https://peraturan.bpk.go.id/Details/49641/pp-no-44-tahun-2005
VII-02	Bab VII	PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	REGULASI PRIMER	2017	Basis penambahan modal BUMD, pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan/penugasan dan kebutuhan kajian.	https://peraturan.bpk.go.id/Details/64765/pp-no-54-tahun-2017
VII-03	Bab VII	Data ilustratif versi buku final	ILUSTRATIF	2026	Identitas dan angka dimodifikasi; tidak ada sumber institusional asli di portal.	—
VII-04	Bab VII	Kerangka penulis	KERANGKA PENULIS	2026	Framework evaluasi public capital setelah penempatan.	—

VIII-01	Bab VIII	Kemenko Perekonomian - Konsolidasi Kredit Program Pemerintah 2026 / publikasi KUR 2026	DATA PUBLIK RESMI	2026	Referensi publik untuk pentingnya debitur baru, graduasi/naik kelas dan kualitas penyaluran.	https:// www.ekon.go.id/ publikasi/detail/ 6784/konsolidasi- kredit-program- pemerintah-2026- perkuat-pedoman- pelaksanaan-kredit- program-optimalkan- penyaluran-dan- wujudkan- pertumbuhan- ekonomi-inklusif- berbasis-usaha- mikro-dan-kecil
VIII-02	Bab VIII	Data ilustratif versi buku final: Lancar 424,95; KL 27,12; Diragukan 3,07; Macet 666,25; total 1.121,39; tidak lancar 62,10%	ILUSTRATIF	2026	Hanya angka ilustratif final; sumber/identitas asli tidak disimpan dan tidak dipulihkan di Digital Companion.	—
VIII-03	Bab VIII	Data ilustratif versi buku final: recovery 4,23T; NPF net 4,07% → 2,17%; NPF gross 26,16% → 27,82%	ILUSTRATIF	2026	Arah tren dipertahankan; identitas dan angka asal tidak tersedia di portal.	—
VIII-04	Bab VIII	Kerangka penulis	KERANGKA PENULIS	2026	Alat diagnosis transaksi → conversion → realization → value.	—
IX-01	Bab IX	Perpres Nomor 46 Tahun 2025 jo. Perpres 16/2018	REGULASI PRIMER	2025	Kerangka PBJ; proses sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima.	https:// jdih.lkpp.go.id/ regulation/peraturan- presiden/peraturan- presiden-nomor-46- tahun-2025

IX-02	Bab IX	Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026	REGULASI PRIMER	2026	Katalog Elektronik/e-purchasing; mencabut Peraturan LKPP 9/2021.	https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-2-tahun-2026
IX-03	Bab IX	KPK - Laporan Kajian Tata Kelola e-Procurement Dalam Pengadaan Barang & Jasa Tahun 2025	DATA/Kajian PRIMER	2025	Basis pembacaan risiko governance e-procurement dan perlunya challenge/assurance.	https://cms.kpk.go.id/storage/9967/LAPORAN-KAJIAN-TATA-KELOLA-E-PROCUREMENT-DALAM-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA-TAHUN-2025.pdf
IX-04	Bab IX	KPK - Laporan Tahunan 2025	DATA PUBLIK RESMI	2025	Konteks risiko dan pencegahan korupsi yang dirujuk.	https://cms.kpk.go.id/storage/9535/Laporan-Tahunan-KPK-2025-Website.pdf
IX-05	Bab IX	KPK - Panduan Asesmen Risiko Korupsi Regulasi (CRA)	PEDOMAN PRIMER	2025	Pembanding risk-based prevention pada regulasi.	https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/panduan-asesmen

IX-06	Bab IX	PP Nomor 39 Tahun 2025	REGULASI PRIMER	2025	Perubahan kedua PP 96/2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha minerba dan mekanisme prioritas tertentu.	https://peraturan.bpk.go.id/Details/331105/pp-no-39-tahun-2025
IX-07	Bab IX	Perpres Nomor 13 Tahun 2018	REGULASI PRIMER	2018	Basis prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi.	https://peraturan.bpk.go.id/Details/73583/perpres-no-13-tahun-2018
IX-08	Bab IX	Kerangka penulis	KERANGKA PENULIS	2026	Alat analitis untuk prioritization, reservation value, public wealth at risk dan governance challenge; bukan definisi hukum kerugian negara.	—
X-01	Bab X	UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	REGULASI PRIMER	2023/berlaku 2026	KUHP berlaku 2 Januari 2026; rujukan tindak pidana dibaca bersama penyesuaian 2026.	https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023
X-02	Bab X	UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana	REGULASI PRIMER	2026	Penyesuaian ketentuan pidana sehubungan berlakunya KUHP Nasional.	https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026
X-03	Bab X	UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001	REGULASI PRIMER	1999/2001	Kerangka Tipikor yang tetap relevan bersama perubahan/penyesuaian KUHP.	https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999
X-04	Bab X	UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban	REGULASI PRIMER	2026	Basis rezim pelindungan saksi/korban yang disebut berlaku sejak 20 Mei 2026.	https://peraturan.bpk.go.id/Details/349942/uu-no-3-tahun-2026

X-05	Bab X	Kerangka penulis	KERANGKA PENULIS	2026	Bukan definisi hukum kerugian negara dan bukan formula pidana/akuntansi; digunakan untuk diagnosis sistem dan redesign.	—
------	-------	------------------	------------------	------	---	---

VERSION CONTROL & UPDATE PROTOCOL

Item	Aturan V3 Final
Cut-off	7 Oktober 2026.
Data resmi	Dapat diperbarui di portal dengan tanggal dan source note; nilai dalam buku cetak tetap diberi konteks tahun/versinya.
Regulasi	Setiap pembaruan harus mencatat status: berlaku, diubah, dicabut, atau diganti.
Kerangka penulis	Tidak diubah apabila perubahan menggeser tesis/konsep utama; perubahan substantif menunggu edisi berikutnya.
Ilustrasi Bab VII-VIII	Tidak pernah dipulihkan ke angka/nama sumber. Portal hanya menyimpan angka ilustratif final, formula, metodologi, dan template.
Referensi baru	Masuk ke update log dengan alasan relevansi, bab terdampak, dan reviewer.